

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Pemblokiran Twitter dan TikTok mencerminkan bagaimana kebijakan negara dapat mempengaruhi penggunaan media sosial sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional. China, dengan tingkat sentralisasi yang tinggi, menggunakan kebijakan ini untuk memperkuat sistem sensor internet dan menjaga stabilitas internalnya. Di sisi lain, AS, meski lebih terbuka dalam hal pengelolaan media sosial, juga menggunakan tindakan serupa untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam menghadapi persaingan teknologi dengan China.

Amerika Serikat, sebagai negara dengan pengaruh teknologi yang besar, memanfaatkan pemblokiran dan regulasi terhadap media sosial yang berasal dari China untuk melindungi kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal keamanan data dan kontrol terhadap pengaruh asing. Pemblokiran TikTok oleh AS, meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan, serta pembatasan terhadap Huawei, mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi ancaman cyber dan pengaruh China melalui teknologi. Langkah-langkah ini juga menjadi bagian dari strategi AS untuk mempertahankan hegemoninya di tengah persaingan global.

Di sisi lain, China menerapkan kebijakan yang ketat terhadap media sosial asing seperti Twitter dan Facebook dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Pemerintah China tidak hanya memblokir akses terhadap media sosial AS, tetapi juga mengembangkan platform domestik yang berada di bawah kendali negara, menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola teknologi dan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa bagi China, media sosial juga merupakan alat penting untuk mempertahankan kendali dan mempromosikan kepentingan negara di kancah internasional.

Secara keseluruhan, persaingan teknologi antara AS dan China mencerminkan pergeseran dalam kebijakan negara-negara besar di era digital, di mana media sosial dan platform teknologi menjadi instrumen

utama dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi. Konflik ini juga menggarisbawahi bahwa pemblokiran dan regulasi terhadap media sosial tidak hanya didorong oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan keamanan dan kepentingan strategis yang lebih luas.

Rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China dalam konteks pemblokiran media sosial, seperti TikTok dan Twitter, mencerminkan perbedaan fundamental dalam pandangan dan kebijakan kedua negara terhadap kebebasan berbicara dan pengelolaan informasi di era digital. AS, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan sistem yang mendukung kebebasan berpendapat, memandang media sosial sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, China, dengan pendekatan yang lebih otoriter, menggunakan kebijakan seperti The Great Firewall untuk mengontrol informasi yang masuk dan keluar dari negaranya demi menjaga stabilitas politik dan sosial.

Pemblokiran platform media sosial oleh kedua negara tidak hanya mencerminkan perbedaan ideologis, tetapi juga mempengaruhi hubungan bilateral yang sudah tegang. Bagi AS, pemblokiran terhadap aplikasi seperti TikTok merupakan upaya untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman pengumpulan data oleh pemerintah China. Sebaliknya, China melihat pemblokiran ini sebagai bentuk intervensi AS dalam urusan domestik dan upaya untuk membendung kebangkitan teknologi China.

Dampak dari rivalitas ini meluas ke berbagai aspek, termasuk fragmentasi digital, ketidakpastian bisnis, peningkatan proteksionisme, dan implikasi terhadap ekonomi digital global. Kedua negara semakin mengandalkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri teknologi lokal mereka, yang pada gilirannya memperburuk ketegangan perdagangan dan menghambat inovasi.

Dampak dari pemblokiran ini memperburuk ketegangan politik antara AS dan China, memperdalam perbedaan ideologis yang mengakar, dan memicu kritik internasional terhadap China atas pelanggaran kebebasan berbicara. Selain itu, pemblokiran ini juga memperkuat persaingan dalam pengembangan media sosial antara kedua negara, di mana China dan AS

berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi satu sama lain dengan mengembangkan platform lokal.

Namun, tindakan China juga menimbulkan keterbatasan ruang dialog dan interaksi internasional, baik untuk masyarakat maupun pemerintah China. Hal ini memperkuat citra China sebagai negara yang tertutup dan menghambat potensi dialog diplomatik yang lebih luas melalui media sosial global.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat penting dalam kebijakan negara, bukan hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga sebagai instrumen politik dan ekonomi yang memiliki implikasi luas terhadap hubungan internasional. Baik AS maupun China menggunakan media sosial untuk mencapai tujuan nasional masing-masing, yang pada akhirnya membentuk dinamika global dalam bidang teknologi, keamanan, dan diplomasi.

